



KEBIJAKAN JEPANG DALAM MENGANTISIPASI KLAIM AIR DEFENSE IDENTIFICATION ZONE (ADIZ) OLEH TIONGKOK

Ingrid Gabriela

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Air Defense Identification Zone (ADIZ) is an air transportation identification system that applied by a country to protect their zone. China ratified ADIZ in November 2013 as one form of defense and security of the country. China ADIZ became an issue because the identification zone claimed by China covers some of the surrounding country's area. One of the area is Senkaku Island which under the administration of Japan. This research aims to know what policies are made by Japan in anticipation of ADIZ claims by China. This research uses political realism theory in understanding the reason of Japan's policies regarding ADIZ. The results showed that the policy is a form of the realization of its national interest, where Japan are strengthening their own defense and security.

Keywords: *air defense identification zone, China, Japan, political realism, national interest*

PENDAHULUAN

ADIZ merupakan suatu zona atau ruang udara yang dibentuk bagi keperluan identifikasi dalam sistem pertahanan udara suatu negara. Ruang udara tersebut dapat terbentang mulai dari wilayah teritorial negara yang bersangkutan hingga mencapai ruang udara di atas laut bebas yang membatasi negara tersebut dengan negara lain. (foreignaffairs.com) Pesawat udara sipil maupun pesawat udara militer yang berada dalam zona tersebut, dan akan terbang mengarah ke pantai negara pendiri ADIZ diwajibkan memberikan laporan rencana penerbangan (*flight plan*) kepada negara pemilik ADIZ.

Penentuan ADIZ didasari dengan perhitungan terhadap ancaman yang benar-benar potensial serta lokasi obyek-obyek vital nasional yang mendapat prioritas untuk dipertahankan dari kemungkinan serangan udara lawan. Setiap negara berhak membentuk ADIZ di wilayah udara yang berada dibawah kedaulatan dan yurisdiksinya, namun penetapan ADIZ yang demikian tidak dimaksudkan untuk memperluas kedaulatan negara pemilik ADIZ atas laut bebas yang tercakup dalam ADIZ negara itu.

Setiap pesawat udara yang terbang menuju negara yang menerapkan sistem ini dalam jarak 200 mil harus menyebutkan jati diri pesawat udara. Hal ini dilakukan untuk keamanan negara dari bahaya yang datang melalui ruang udara. Melalui ADIZ maka semua pesawat terbang sipil atau militer yang melintas harus melaporkan diri kepada pengawas penerbangan militer. Sistem pelaporannya berbeda dengan sistem pengaturan lalu lintas udara sipil. Karena tujuannya untuk pertahanan udara di wilayah negara, tentu saja sistem ini didukung oleh sistem radar yang terkoneksi dengan sistem persenjataan pertahanan udara. Sistem persenjataan pertahanan udara inilah yang menjadi faktor penentu keberhasilan ADIZ. (cfinotebook.net)

Konsep ADIZ muncul pada perang dunia, ketika Amerika Serikat menyatakan pembentukan ADIZ pertama kali di dunia untuk mengurangi risiko serangan mendadak dari Uni Soviet. Selain memberikan ukuran keamanan tambahan, ADIZ dapat membantu mengurangi risiko tabrakan di udara, memerangi lalu lintas obat terlarang, memfasilitasi misi pencarian dan penyelamatan dan mengurangi kebutuhan jet tempur untuk tujuan inspeksi visual. ADIZ ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, prediktabilitas, dan stabilitas strategis dengan mengurangi ketidakpastian di kedua belah pihak tentang kapan, di mana dan bagaimana penghadangan di udara mungkin terjadi.

Sistem pertahanan dan pengamanan udara ini kemudian diratifikasi oleh Tiongkok pada 23 November 2013 yang menimbulkan reaksi keras dari negara-negara di Asia Timur yang merasa terancam atas kebijakan Tiongkok tersebut. Wilayah cakupan dari sistem identifikasi ini terdiri dari wilayah udara di sekitar laut timur Tiongkok, yang kemudian mendapat respon negatif dari wilayah Asia Timur, terutama dari Jepang.

Reaksi negatif ini muncul dari beberapa alasan, yang pertama, Tiongkok belum berkonsultasi dengan beberapa negara tetangga. Hal ini dianggap perlu karena ADIZ Tiongkok dianggap akan mengganggu dan mengancam jalannya lalu lintas penerbangan di wilayah udara internasional. ADIZ yang diadopsi oleh Tiongkok berbeda dengan ADIZ yang diadopsi oleh negara-negara lainnya, seperti Kanada, Korea Selatan, Amerika Serikat dan Jepang. Selain permasalahan tersebut, ADIZ Tiongkok juga menjadi isu karena wilayah cakupan dari ADIZ Tiongkok yang diumumkan pada November 2013 dianggap melewati batas wilayah udaranya dan wilayah udara internasional. ADIZ Tiongkok mencakup wilayah Kepulauan Senkaku, yang merupakan wilayah administrasi Jepang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini akan membahas bagaimana kebijakan Jepang dalam mengantisipasi klaim ADIZ oleh Tiongkok pada tahun 2013? Penelitian ini akan menggunakan pemikiran realisme politik dalam mengetahui perilaku Jepang dalam mengambil kebijakan baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mengantisipasi klaim ADIZ oleh Tiongkok. Melihat dari pemikiran realisme politik mengenai pentingnya keamanan dan kepentingan nasional, Jepang perlu menyikapi klaim Tiongkok yang mencakup wilayah udara Jepang.

PEMBAHASAN

Kementerian Pertahanan Nasional Tiongkok menyatakan bahwa ADIZ merupakan langkah yang diperlukan untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan wilayah udara Tiongkok. ADIZ dibentuk untuk menyediakan sistem peringatan dini untuk pertahanan udara nasional Tiongkok, dan merupakan langkah defensif yang tidak ditujukan ke negara atau wilayah tertentu, dan sejalan dengan hukum serta konvensi internasional yang berlaku mengenai keamanan wilayah udara.

Tiongkok mengklaim ADIZ sebagai zona identifikasi dalam wilayah udara internasional, bukan berarti wilayah udara tersebut menjadi kedaulatan Tiongkok. Dengan kata lain, ADIZ tidak akan mempengaruhi kebebasan yang dinikmati pesawat lain sesuai dengan hukum internasional - tetapi Tiongkok memiliki hak untuk memicu prosedur identifikasi dan investigasi terhadap pesawat yang memasuki zona tersebut. Keputusan semacam itu dibuat sesuai dengan pertimbangan sifat militer, pesawat sipil, potensi ancamannya, dan jaraknya dari Tiongkok.

Tiongkok juga menyatakan bahwa penerapan ADIZ akan memberikan keuntungan terhadap keselamatan penerbangan internasional. Wilayah udara Laut Timur Tiongkok yang penuh dengan jalur penerbangan, dianggap perlu proteksi lebih untuk menghindari ancaman dari wilayah udara. Selama ini, banyak penerbangan, baik sipil maupun militer yang melintasi Laut Timur Tiongkok tanpa adanya pemberitahuan kepada Tiongkok. Penerapan ADIZ dianggap sebagai langkah defensif yang dirancang untuk memberikan

pemberitahuan terlebih dahulu tentang potensi ancaman dan upaya untuk meningkatkan keselamatan penerbangan di wilayah tersebut. (thediplomat.com)

Dalam penerapannya, Kementerian Pertahanan Nasional Tiongkok menjelaskan pesawat asing di dalam zona identifikasi akan mematuhi beberapa hal. Pertama adalah identifikasi rencana penerbangan dimana setiap pesawat di zona identifikasi harus melaporkan rencana penerbangannya ke Kementerian Luar Negeri Tiongkok atau Administrasi Penerbangan Sipil. Kedua, identifikasi radio dimana pesawat udara di dalam zona harus mempertahankan komunikasi radio dua arah dan merespons secara tepat waktu dan akurat. Ketiga, identifikasi responden yang mengharuskan setiap pesawat dengan transponder Air Traffic Control Radar Beacon System tetap menyala selama pesawat di dalam zona tersebut. Keempat adalah identifikasi tanda dimana setiap pesawat di dalam zona harus menunjukkan lambang yang menunjukkan kewarganegaraan dan registrasinya dengan jelas, sesuai dengan perjanjian internasional

Hal yang menjadi isu dalam zona identifikasi Tiongkok ini adalah kewajiban semua pesawat terbang di ADIZ, tidak hanya yang bermaksud memasuki wilayah udara teritorial Tiongkok, untuk mengikuti aturan identifikasi, termasuk mengajukan rencana penerbangan dengan Kementerian Luar Negeri atau Administrasi Penerbangan Sipil Tiongkok, memelihara komunikasi radio dua arah dan segera menanggapi permintaan identifikasi dari Kementerian Pertahanan Nasional, mengoperasikan penjawab radar sekunder (jika dilengkapi) dan menandai kebangsaan dan logo dengan jelas. Pesawat di zona itu harus mengikuti instruksi dan Militer Tiongkok akan mengadopsi langkah-langkah pertahanan darurat sebagai respon terhadap pesawat yang menolak untuk mengikuti instruksi.

ADIZ tidak memberikan negara yang menyatakannya sebagai otoritas yurisdiksi atas wilayah udara yang terlibat. Menurut hukum internasional, perairan teritorial negara - dan dengan demikian wilayah udara kedaulatannya - berakhir 12 mil laut dari garis pantai dan semua negara memiliki hak untuk mengoperasikan pesawat sipil atau militer tanpa izin negara pantai di wilayah udara internasional. Negara hanya dapat mewajibkan pesawat terbang di ADIZ yang berniat meninggalkan wilayah udara internasional dan memasuki wilayah udara nasional yang sepenuhnya berdaulat di negara pantai untuk mengikuti prosedur identifikasi.

Hal kedua yang menjadi isu adalah wilayah ADIZ Tiongkok yang mencakup wilayah administrasi Jepang yaitu Kepulauan Senkaku. Perebutan wilayah Kepulauan Senkaku sudah menjadi isu antara Jepang dan Tiongkok sejak 1995. Dalam perebutan wilayah Kepulauan Senkaku, Tiongkok menyatakan bahwa Tiongkok yang pertama kali menemukan dan menamai pulau itu Diaoyu Dao. Catatan sejarah paling awal dari nama-nama Diaoyu Dao dapat ditemukan dalam buku *Voyage with a Tail Wind* yang diterbitkan pada tahun 1403. Tiongkok juga menyatakan bahwa perairan di sekitar pulau-pulau ini secara tradisional telah menjadi daerah penangkapan ikan Tiongkok selama beberapa generasi.

Jepang di sisi lain, menyatakan bahwa Kepulauan Senkaku jelas merupakan wilayah yang melekat di Jepang. Pada bulan Januari 1895 Pemerintah Jepang memasukkan pulau-pulau itu ke wilayah Jepang dengan cara yang sah menurut kerangka hukum internasional. Setelah Perang Dunia II, Perjanjian Damai San Francisco menempatkan Kepulauan Senkaku di bawah administrasi Amerika Serikat sebagai bagian dari Okinawa, sehingga menegaskan kembali status pulau-pulau sebagai bagian dari wilayah Jepang. Selanjutnya, Kepulauan Senkaku dimasukkan dalam Perjanjian Reversion Okinawa tahun 1972 antara Amerika Serikat dan Jepang sebagai bagian dari wilayah di mana hak administratif dikembalikan ke Jepang. (Ministry of Foreign Affairs Japan) Semua fakta ini

menunjukkan Kepulauan Senkaku menjadi bagian yang konsisten dari wilayah Jepang dalam tatanan internasional pasca-perang dan sesuai dengan hukum internasional.

Menanggapi klaim ADIZ dari Tiongkok, Jepang melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan kekecewaannya dalam klaim ADIZ dimana dalam pernyataannya disampaikan bahwa "...pembentukan zona semacam itu di Tiongkok dan mewajibkan aturannya sendiri di dalam zona tersebut, tindakan yang sangat berbahaya yang secara sepihak mengubah status quo di Laut Tiongkok Timur, meningkatkan situasi, dan yang dapat menyebabkan tidak diinginkan konsekuensi di Laut Tiongkok Timur."

Dalam menanggapi klaim Jepang yang menanggapi bahwa Tiongkok mau mengubah secara sepihak status quo di Laut Tiongkok Timur, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan bahwa "Fakta isu-isu yang relevan mengenai Laut Tiongkok Timur jelas. Tuduhan Jepang terhadap Tiongkok membingungkan benar dan salah dan sama sekali tidak berdasar. Masa lalu, jika tidak dilupakan, bisa berfungsi sebagai panduan ke masa depan. Karena alasan historis, itu wajar bagi masyarakat internasional dan tetangga Asia Jepang, termasuk Tiongkok untuk mengawasi tren pembangunan Jepang. Sangat keliru bahwa orang Jepang yang relevan mengacaukan yang benar dengan yang salah dan menggunakan kesempatan untuk menyerang Tiongkok. Kami sangat tidak puas. Kami mendesak pihak Jepang untuk mendengarkan kekhawatiran dan suara dari tetangga Asia dan komunitas internasional dengan pikiran terbuka dan bekerja untuk meningkatkan hubungan bilateral."

Jepang kemudian menyatakan akan menempuh jalur diplomasi dan mengajak Tiongkok untuk berdialog membahas isu ADIZ ini. Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, dalam pertemuan Sino-Jepang yang diadakan setelah APEC Summit 2014 di Beijing, menyatakan "Jepang dan Tiongkok adalah negara tetangga yang menghadapi masalah individual, tetapi kita harus mencegah masalah tersebut merusak hubungan secara keseluruhan. Perhatian khusus Jepang telah disampaikan pada Pertemuan Menteri Luar Negeri. Saya dengan segala cara berharap Anda akan merespons secara positif," kepada Presiden Tiongkok, Xi Jinping.

Komunikasi antara Kementerian Luar Negeri Tiongkok dan Jepang tidak menghasilkan kesepakatan. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hong Lei, pada konferensi pers dalam menanggapi pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Jepang mengenai kekecewaan Jepang terhadap ADIZ Tiongkok, menyatakan bahwa "Tiongkok tegas dalam menegakkan keamanan nasional dan semua negara lain seharusnya tidak membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, Tiongkok akan, seperti biasanya, tetap teguh pada jalan pembangunan damai, tetap sebagai kekuatan yang kukuh dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di Asia Pasifik dan mendorong kerja sama dan pembangunan. Tiongkok dengan tegas menentang kata-kata dan tindakan yang relevan dari negara-negara yang dengan sengaja memprovokasi konfrontasi regional terlepas dari keamanan pihak lain. Ini adalah faktor fundamental yang mempengaruhi perdamaian dan stabilitas regional."

Selain menempuh jalur diplomasi, Jepang juga mengambil beberapa kebijakan dalam negeri, terutama dalam bidang pertahanan negara. Hal ini dipicu karena semenjak Tiongkok mengumumkan ADIZ, aktifitas Tiongkok di wilayah udara Jepang semakin meningkat. Pesawat sayap tetap (Y-12) milik Administrasi Kelautan Negara (SOA) Tiongkok menyusup ke wilayah udara Jepang di atas Kepulauan Senkaku, yang merupakan wilayah administrasi Jepang.

Kementerian Pertahanan Nasional Tiongkok juga mengumumkan kegiatan pesawat *People's Liberation Army* (PLA) di Laut Tiongkok Timur, yang tampak sebagai kegiatan pengawasan rutin dan patroli udara tempur. Selain itu, Jepang yang mengkonfirmasi

lewatnya sebuah pesawat peringatan dini Y-8 dan seorang pembom H-6 antara Pulau Utama Okinawa dan Pulau Miyakojima ke Samudra Pasifik untuk pertama kalinya.

Pemerintah Jepang membuat beberapa kebijakan terhadap pertahanan Jepang, salah satunya adalah menaikkan anggaran belanja pertahanan Jepang. Hal ini dilakukan untuk memastikan keamanan wilayah Jepang dari ancaman-ancaman yang mungkin terjadi di kemudian hari. Pada Konferensi Tingkat Tinggi antara Jepang dan ASEAN di Tokyo, Jepang mengumumkan rencana untuk meningkatkan anggaran belanja militer dan mendapat dukungan dari negara-negara Asia Tenggara. (thatsmags.com) Negara-negara di Asia Tenggara juga mendukung langkah Jepang untuk mempertahankan kebebasan penerbangan di atas wilayah Laut Tiongkok Timur.

Kementerian Pertahanan Jepang mengajukan kenaikan anggaran pertahanan untuk tahun 2014 yang disetujui oleh pemerintah. Kenaikan berturut-turut ini menggambarkan persiapan Jepang untuk memperkuat pertahanannya. Peningkatan anggaran tersebut juga dibenarkan oleh Menteri Pertahanan Jepang, Satoshi Morimoto yang menyatakan sikapnya "...memang menjadi pilihan yang sulit untuk meningkatkan anggaran pertahanan kami (bidang pertahanan Jepang), namun demi tercapainya kepentingan keamanan upaya ini kami tempuh dengan menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan lainnya secara sinergis." (cfr.org)

Selain meningkatkan anggaran belanja pertahanan Jepang, pengembangan industri pertahanan dan modernisasi alutsista Jepang juga dilakukan. Upaya ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Jepang untuk melepaskan ketergantungan pasokan persenjataan dari negara lain. Beberapa industri pertahanan yang menjadi ujung tombak program ini adalah Komatsu Limited, Mitsubishi Electric, Japan Steel Work, Fujitsu dan beberapa industri lainnya.

Perusahaan-perusahaan ini nantinya diorientasikan untuk menghadapi berbagai ancaman terkini bagi stabilitas dalam negeri, serta regional Asia Timur, termasuk dalam menangani sikap impresif Tiongkok melalui klaim ADIZ. (thediplomat.com) Keberadaan industri-industri tersebut bukan hanya berperan sebagai penyedia suku cadang, namun juga pengembangan alutsista terbaru, misalnya pesawat tempur JASDF F-2 yang merupakan pengembangan dari pesawat tempur asal Amerika Serikat F-16.

Sebagai contoh tentang hal ini adalah Komatsu Limited yang sejak tahun 2008 telah mendapat lisensi dari Amerika Serikat untuk memproduksi suku cadang penggerak bagi Tank Abrams yang dimiliki oleh JDF. Kemudian Mitsubishi Electric pada sejak tahun 2008 telah memproduksi semi konduktor untuk mengatur misil pesawat tempur (*side winder*) yang menyebabkan Jepang tidak lagi tergantung pada unit alutsista, suku cadang dan *research and development* negara lain, khususnya Amerika Serikat. (thediplomat.com)

Kemudian dalam mendukung kemampuan sistem pertahanan, Jepang juga menerapkan sistem pertahanan terpadu. Di wilayah darat Jepang membuat M270 peluncur roket dan kendaraan lapis baja ringan. Di wilayah laut, Lockheed Martin menyediakan kapal angkatan laut khusus. Lockheed Martin juga memproduksi dan menjual sistem tempur canggih Aegis, digunakan di atas kapal angkatan laut, serta berbagai sistem rudal yang meliputi kapal selam Trident yang meluncurkan rudal balistik (SLBM). Pengembangan sistem pertahanan darat ke udara ini dijalankan melalui kerjasama Jepang dengan Lockheed Martin. Perusahaan juga berinvestasi dalam pengembangan sistem pertahanan rudal termasuk PAC-3 dan system THAAD.

Jepang juga mengadakan program pengembangan teknologi militer yaitu pengembangan fasilitas terpadu PMRF (*Pacific Missile Range Facility*). Teknologi militer ini dijalankan oleh Jepang menggunakan peluru kendali jarak menengah dengan jarak ledak sekitar 800 km yang dinamakan DDG 173. (nti.org) Dengan PMRF maka jika sewaktu-waktu Korea Utara atau Tiongkok meluncurkan misil ke wilayah Jepang maka

akan dapat ditangkal dengan senjata canggih ini melalui peluncuran darat ke udara (*air shield*).

Selain itu, Jepang juga membangun program fasilitas persenjataan terpadu ABMD (*Aegis Ballistic Missile of Defense*). ABMD bersifat bukan untuk menangkal misil Tiongkok dari darat ke udara, namun dari laut ke udara dimana misil-misil peluru kendali jarak pendek dan menengah ditempatkan di skuadron kapal selam kelas Kongo dan Kilo.

KESIMPULAN

Melalui uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa klaim ADIZ oleh Tiongkok merupakan wujud sikap impresif dari negara ini bersamaan dengan tercapainya kemajuan Tiongkok di berbagai bidang, diantaranya ekonomi, sosial dan tentunya bidang pertahanan dan militer. Dalam rangka menjamin stabilitas bidang pertahanan dan keamanan kemudian Tiongkok menerapkan konsep ADIZ yang sebelumnya juga diratifikasi oleh negara lain, diantaranya Kanada, Amerika Serikat, Norwegia, Inggris termasuk Jepang. Meskipun klaim ADIZ banyak dipertentangkan karena statusnya yang cukup lemah karena cakupan zona identifikasi dari Tiongkok ini melewati batas wilayah negara lain, namun pihak Tiongkok tetap menjalankan ketentuan ini untuk dapat menjamin stabilitas wilayah udaranya.

Dalam menghadapi sikap impresif dari Tiongkok ini kemudian Jepang menerapkan beberapa kebijakan aktif dan defensif, diantaranya melalui penyesuaian anggaran pertahanan. Jepang juga menempuh jalur diplomasi dengan mengundang Tiongkok untuk dialog-dialog terbuka. Jepang menyatakan ingin menempuh jalur halus dan menghindari konflik yang lebih besar lagi. Tetapi dalam menanggapi pernyataan serta pendekatan diplomasi Jepang, Tiongkok tetap pada posisinya dan tidak mau untuk merubah atau meninjau kembali keputusan yang diambil mengenai ADIZ.

Selain jalur diplomasi, Jepang juga menaikkan anggaran belanja pertahanan negara, untuk mengantisipasi klaim ADIZ oleh Tiongkok. Dengan semakin meningkatnya aktifitas Tiongkok di wilayah udara Jepang, Jepang memperkuat lini pertahanannya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Kebijakan Jepang selanjutnya dalam mengantisipasi klaim ADIZ oleh Tiongkok adalah melalui pengembangan industri pertahanan dan teknologi alutsista modern. Memasuki era milenium ketiga, dinamika sistem pertahanan global tidak saja mengedepankan aspek *human power*, namun juga *equipment power* sehingga dapat mendukung sistem pengamanan yang efektif dan efisien. Beberapa upaya yang ditempuh oleh Jepang ini diantaranya melalui program alih teknologi dari Amerika Serikat, serta mengembangkan sistem pertahanan secara mandiri.

Melalui pemikiran realisme politik yang dipakai dalam penelitian ini, sikap dan kebijakan yang dibuat oleh Jepang muncul dari perannya sebagai negara yang menjamin perlindungan terhadap individu dan wilayahnya. Perilaku Jepang dalam mengambil kebijakan dan kerjasama juga tidak terlepas dari kepentingan nasionalnya. Jepang mengedepankan keamanan dan kedaulatan wilayahnya dalam menyikapi klaim ADIZ yang dimana zona identifikasinya mencakup wilayah Kepulauan Senkaku yang berada di bawah administrasi Jepang.

Referensi

Air Defense Identification Zone (ADIZ). Available at <https://www.foreignaffairs.com/articles/east-asia/2013-12-09/whats-adiz> diakses pada tanggal 9 April 2018.

BMD and Japan : Nuclear Treat Initiative. Available at <http://www.nti.org/country-profiles/japan/delivery-systems/> diakses pada tanggal 16 Mei 2018.

- China's activities surrounding Japan's airspace. Available at http://www.mod.go.jp/e/d_act/ryouku/ diakses pada tanggal 23 Juni 2018.
- China's ADIZ and the Japan-US Response. Available at <https://thediplomat.com/2013/12/chinas-adiz-and-the-japan-us-response/> diakses pada tanggal 22 Juni 2018.
- Defense Programs and Budget of Japan: Overview of FY 2013 Budget. Available at http://www.mod.go.jp/e/d_budget/pdf/250516.pdf diakses pada tanggal 10 Januari 2018.
- Defense Programs and Budget of Japan: Overview of FY 2014 Budget. Available at http://www.mod.go.jp/e/d_budget/pdf/260130.pdf diakses pada tanggal 10 Januari 2018.
- Foreign Ministry Spokesperson Hong Lei's Regular Press Conference on December 9, 2013. Available at <http://sa.china-embassy.org/eng/fyrth/t1107035.htm> diakses pada tanggal 22 Juni 2018.
- Japan and Its Military. Available at <https://www.cfr.org/background/japan-and-its-military> diakses pada tanggal 12 Mei 2018.
- Japan-China Summit Meeting. Available at https://www.mofa.go.jp/a_o/c_m1/cn/page4e_000151.html diakses pada tanggal 23 Juni 2018.
- Japan increases military spending and rallies international support against China's ADIZ. Available at <http://www.thatsmags.com/china/post/2602/japan-increases-military-spending-and-rallies-international-support-against-chinas-adiz> diakses pada tanggal 12 Mei 2018.
- Statement by the Minister for Foreign Affairs on the announcement on the “East China Sea Air Defense Identification Zone” by the Ministry of National Defense of the People's Republic of China. Available at https://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_000098.html diakses pada tanggal 22 Juni 2018.
- Whats an ADIZ. Available at <https://www.foreignaffairs.com/articles/east-asia/2013-12-09/whats-adiz> diakses pada tanggal 18 Desember 2017.